

ABSTRAK

Dede Panji Suhenda. Penerapan Prinsip *Syûrâ* di DPRD Kota Bandung (*Studi Kasus Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan*)

Indonesia yang menganut sistem demokrasi menempatkan *syûrâ* (musyawarah) diranah kekuasaan Legislatif yang berfungsi sebagai penyusun dan pembuat peraturan perundang-undangan. Selain itu juga sebagai pengawas atas implementasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung adalah lembaga legislatif yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota Bandung yang bekerja sama dengan kepala daerah/ wali kota untuk memajukan pemerintahan daerah kota Bandung berdasarkan demokrasi pancasila. *Syûrâ* sebagai prinsip dipraktikkan dalam ketatanegaraan Indonesia, dan secara filosofis *syûrâ* masuk dalam kerangka ideologi negara sebagaimana yang tertuang dalam pancasila ke 4 (Empat) yang berbunyi; “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan*”

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui penerapan prinsip *syûrâ* (musyawarah) di DPRD Kota Bandung, dan menganalisis hubungan prinsip *syûrâ* dengan proses musyawarah di DPRD Kota Bandung.

Syûrâ yang secara harfiah berarti meminta pendapat pada orang lain. Musyawarah adalah eksplorasi pendapat orang-orang berpengalaman untuk mencapai sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran. Intinya *syûrâ* dan musyawarah adalah sebuah proses diskursus dalam memecahkan suatu permasalahan sebagai upaya bersama untuk mencapai kesepakatan. Dalam melaksanakannya ada 4 (empat) unsur penentu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu; *Mustasyir, Musytasyar, Mustasyar fih, Ra'yu.* yang dimana prinsip-prinsip itu adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan, dan keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah; teknik *observasi* dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan menghimpun, menganalisis dan menemukan data yang penting.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *syûrâ* (musyawarah) pada DPRD Kota Bandung terbagi atas: *Pertama*, Penerapan *Syûra* dalam Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tidak terlepas dari alat kelengkapan DPRD, yang mencakup pada prakarasa pembuatan, pembahasan rancangan, dan persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah. *Kedua*, Penerapan *Syûra* dalam Rapat Komisi adalah sangat tertutup dan perbedaan pendapat dikalangan para anggota sangat dominan. *Ketiga*, Penerapan *Syûra* dalam Rapat Paripurna adalah selalu bersifat terbuka dan selalu menggunakan *voting* setiap pengambilan keputusannya. Hubungan prinsip *syûrâ* dengan proses musyawarah di DPRD Kota Bandung: *Pertama*, pemetaan prinsip *syûrâ* bahwa prinsip ini berasal perintah al-Quran. Prinsip ini adalah persamaan, kebebasan, dan keadilan. *Kedua*, Perasamaan, *syûrâ* dan demokrasi dilihat dari: a). Kedaulatan Rakyat, b). Suara Mayoritas (*al-Aktsariyyah*), c). *Voting* (al-Tashwit), d). Mufakat. *Ketiga*, Perbedaan *Syûrâ* dan demokrasi dilihat dari: a). Penetapan keputusan, b). Medan Tanggung Jawab, c). Proses *Syûrâ* (Musyawarah), d). Keikutsertaan Eksekutif dalam Musyawarah (*Syûrâ*), e.) Penyelesaian sengketa kewenangan antara Legislatif dengan Eksekutif

Kata Kunci: Penerapan Prinsip *Syûrâ*, DPRD.